

ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN APBD PROVINSI JAMBI MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

JUMIATI
NIM: 503180020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN
JAMBI
2021/2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiati

NIM : 503180020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : **ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN APBD PROVINSI JAMBI MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PERIODE 2017-2020**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 02 Juni 2022


Jumiati
Jumiati
NIM.503180020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, 11 April 2022

Pembimbing I : Efni Anita, SE., M.E.Sy.
Pembimbing II : Ahmad SyukronPrasaja, M.Sc.
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl.Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura , Kota Jambi
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Jumiati NIM : 503180020 yang berjudul; 'ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN APBD PROVINSI JAMBI MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2017-2020' telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikian nota dinas ini dibuat, dan diucapkan terimakasih.

Yang menyatakan;

Dosen Pembimbing I,



Efni Anita, SE., M.E.Sy.
NIP. 198607172015032004

Dosen Pembimbing II,



Ahmad Syukron Prasaja, M.Sc.
NIP. 199002272019031013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi.uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-53/D.V/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan judul "Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode tahun 2017-2020" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Jumiati
NIM : 503180020
Tanggal ujian skripsi : 01 Juli 2022
Nilai munaqasyah : 81,37 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Habriyanto, M.E.I.
NIP.197810051009121004

Penguji I

Mellva Embun Baining, M.E.I.
NIP.198405172011012012

Pembimbing I

Efni Anita, S.E., M.E.Sv
NIP.198607172015032004

Penguji II

Ahmad Syahrizal, M.E.
NIP.199208142019031012

Pembimbing II

Ahmad Syukron Prasaja, M.Sc
NIP.199002272019031013

Sekretaris Sidang

Beid Fitrianova Andriani, M.E
NIDN.2008091101

Jambi, Juli 2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag.
NIP.197311251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(Q.S. Al-Mudatstsir : 38)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Al-Quran dan Terjemahan, Al-Mudatsir (74) : 38, (Jakarta Departemen Agama Republik Indonesia,2014). hal. 576.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ibunda Hasnawati yang tercinta dan ayahanda Ambo Aming yang saya hormati serta nenek Mina yang terkasih. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah diberikan selama ini. Doakan selalu anak mu agar sukses dunia dan akhirat serta bahagia selalu di jalan yang dipilih.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu memberikan bantuan dan selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Dan teruntuk motivator terbaik penulis yaitu Bangtan Boys (BTS) yang memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam segala hal, yang mengajarkan untuk selalu mencintai diri sendiri, dan selalu memberi semangat dan inspirasi lewat lirik lagunya dan berbagai kegiatan positifnya sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik, serta memberikan hiburan dan moodbooster di saat penulis lelah.

Semoga kita semua dalam Ridho-nya dan mendapat amal yang baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal'aalamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRAK

Ciri utama suatu daerah menjadi suatu daerah yang otonom terletak pada sumber daya keuangan daerah, yaitu harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangan secara mandiri dengan meminimalkan ketergantungannya kepada pemerintah pusat, sehingga penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hingga saat ini berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuan daerah di sektor keuangan, karena aspek keuangan daerah penting untuk di telaah lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode 2017-2020 dengan menggunakan rasio keuangan daerah diantaranya untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio eaktivitas, dan pengukuran indeks kinerja keuangan pemerintah secara umum. Dengan melalui analisis terhadap kinerja keuangan daerah akan mendapatkan gambaran mengenai rangkaian kinerja dan aktivitas perusahaan serta dapat menemukan kelemahan di dalam kinerja keuangan daerah. Metode yang dipergunakan pada pada penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder. Hasil Analisa menunjukkan bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum berada pada kategori Cukup Baik. Namun diharapkan pemerintah harus lebih mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalkan belanja daerah.

Kata Kunci : APBD, Kinerja keuangan, Rasio Keuangan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

The main characteristic of a region becoming an autonomous region lies in regional financial resources, which must have the strength and ability to develop financial resources independently by minimizing its dependence on the central government, so this research is motivated by the existence of local government authorities in managing regional finance. Until now, various policies have been taken to develop and improve the capacity of the regions in the field of finance, because the aspects of regional finance are important to be studied further. This study aims to analyze the Financial Performance APBD Level of the Jambi Province for the period 2017-2020 using regional financial ratios including the independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, activity ratio, and measurement of the government's financial performance index in general. Through an analysis of regional financial performance will get an overview of the company's performance and activities and can find weaknesses in regional financial performance. The method used in this research is secondary data. The result of the analysis show that the level of financial performance of the Jambi Province government in general is in the Fairly Good Category. However, it is hoped that the government should be able to increase local revenue and minimize regional spending.

Keywords: regional revenue and expenditure budget; financial performance; regional financial ratio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020**”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Efni Anita, S.E., M.Sy selaku pembimbing I dan Ahmad Syukron Prasaja, M.Sc selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthah Thaha Saifuddin Jambi.
3. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthah Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Rafidah, M.E.I. selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsih, Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sucipto selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Mellya Embun Baining, S.E., M.E.I. dan Erwin Saputra Siregar, S.E.I., M.E. selaku Ketua Dan Sekertaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthah Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthah Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthah Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthah Jambi

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini, terima kasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi 02 Juni 2022

Penulis

Jumiati

503180020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu (*science*) dan *engineering* (teknologi), tetapi dapat juga diartikan sebagai suatu proses. Menurut skala dan bentuk organisasi pemakai informasi akuntansi², bidang akuntansi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu : Akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor swasta adalah proses akuntansi yang mencatat kegiatan ekonomi perusahaan yang berorientasi pada laba, sedangkan akuntansi sektor publik berlaku untuk organisasi nirlaba seperti yayasan dan pemerintah.

Pemerintah daerah Indonesia adalah badan penyelenggara pemerintahan daerah yang dikelola bersama sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, berdasarkan asas otonomi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya kewenangan otonomi. Otonomi adalah kekuasaan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengambil keputusan daerah, sehingga dapat mengelola sumber dayanya sesuai dengan keputusan sendiri, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional untuk dicapai melalui pengaturan, alokasi, dan penggunaan sumber daya nasional yang rasional, serta perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah³. Pembangunan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Keuangan Pusat dan Perimbangan Keuangan Daerah Nomor 33 Tahun 2004, di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk memahami pemerintahan dan mengelola pembangunannya sendiri

² Aidil Hada Pratama, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Skripsi," 2017, Hal. 2.

³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal. 21.

dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.⁴ Menurut Pasal 4 peraturan pemerintah no. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai pemerintah yang harus mengelola keuangan dengan amanah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58⁶ berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴Didik Suhardi, *Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP* (Jakarta: KEMDIKBUD, 2017), Hal. 8.

⁵Andy P Hamzah dan Nur Aisyah Kustiani, *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: STAN Press, 2014), Hal. 11.

⁶Al-Quran Dan Terjemahan, An-Nissa (4) : 58, (Jakarta Departemen Agama Republik Indonesia, 2014). Hal.87

dengan per-aturan daerah. Undang-undang no.32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 januari sampai 31 desember. Dengan demikian APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD.⁷

Ciri utama suatu daerah menjadi daerah otonom terletak pada sumber daya keuangan daerah, yaitu daerah otonom harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangan secara mandiri dengan meminimalkan ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Jika pemerintahan di semua tingkatan dapat mengelola keuangannya dan menyediakan dana untuk tanggung jawab dan wewenang daerahnya masing-masing, maka keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal.⁸

Provinsi Jambi terdiri 11 kabupaten/kota diantaranya nya kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan kota Sungai Penuh.

Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷ Hamzah dan Kustiani, *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*, 1 ed. (Tangerang Selatan: STAN Press, 2014), Hal. 5.

⁸ Wan Vidi Rukmana, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau," Hal. 2.

Tabel 1.1 Pagu Dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi
Tahun 2017-2020

(Dalam bentuk miliaran)

Priode	Pendapatan		Belanja		Defisit/surplus	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	pagu	Realisasi
2017	16.588,8	17.269,1	17.164,5	16.872,7	(575,7)	396,4
2018	4.218,02	4.412,46	4.515,14	4.198,26	(297,12)	214,2
2019	4.517,55	4.575,19	4.813,41	4.824,37	(295,86)	(249,18)
2020	4.694,00	4.400,62	5.244,84	4.430,39	(550,84)	(29,77)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data tabel diatas dilihat bahwa pagu dan realisasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami defisit dimana realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dua tahun terakhir menunjukkan menurunnya performa pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Persentasi Capaian Realisasi Pendapatan dari Agregat APBD
Provinsi Jambi Periode 2017-2020

Periode	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2017	17.269,10	2.859,65
2018	4.412,46	1.656,57
2019	4.575,19	1.651,09
2020	4.400,62	1.535,18

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Untuk mengetahui besar persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dilakukan perhitungan dengan cara berikut:

$$\left(\frac{\text{nilai realisasi PAD}}{\text{nilai total Pendapatan Daerah}} \times 100 \right)$$

Maka berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PAD dari total pendapatan di tahun 2017 sebesar 16,56%, untuk tahun 2018 sebesar 37,54% dari total pendapatan daerah. Ditahun 2019 persentase PAD sebesar 36,09%, dan persentase PAD di tahun 2020

sebesar 34,89%. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan PAD masih sedikit dibanding dengan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) dari total pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu pemerintah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah⁹.

Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah diukur dari kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Ada beberapa metode untuk menghitung kinerja fiskal daerah, antara lain menghitung rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kesesuaian anggaran terhadap pengeluaran belanja dan pendapatan daerah. Sekaligus menghitung kapasitas fiskal daerah, yaitu menghitung pangsa dan pertumbuhannya. Kemudian menganalisa hasil dari setiap perhitungan dengan cara membandingkan hasil suatu wilayah dari satu periode ke periode sebelumnya, sehingga dapat dilihat bagaimana trend yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah¹⁰.

⁹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal.18.

¹⁰ Soelistijono Boedi, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Apbd Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan" 2 (2012): Hal. 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Meurut kamus akuntansi manajemen, kinerja (performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau perundang undangan selama periode anggaran.¹¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi yang revelan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, dan kesesuaian penyajian laporan menurut peraturan perundang-undangan.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

¹¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal. 7.

¹² Hery Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (25 Maret 2019): Hal. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah yang diteliti oleh Hery Susanto (2019) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Mataram dikategorikan kurang baik karena terjadinya penurunan PAD setiap tahun selama kurun waktu perhitungan sedangkan pendapatan daerahnya selama waktu penelitian juga mengalami turun naik sehingga belum dikatakan optimal.

Pada penelitian P.P. Utami Mailangkay, Dkk (2020) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja keuangan kota Bitung masih rendah, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri dan pertumbuhan PAD kota Bitung masih tergolong fluktuatif.

Dalam Penelitian J.J.Pilat dan J. Morasa (2017) menjelaskan bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah kota Manado masih belum ideal, dalam analisis perhitungannya menunjukkan kemampuan keuangan kota Manado tergolong tinggi, tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah kota Manado disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat sehingga dituntut untuk meningkatkan PAD-nya, dikarenakan hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan pemerintah daerah.

Dan untuk penelitian S.D. Rawis, Dkk (2020) hasilnya menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Sulawesi Utara menunjukkan kurang baik, dimana pemerintah belum mampu dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan analisis pengukuran rasio. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi¹³.

Dalam penelitian Hery Susano (2019) dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal, pemerintah daerah perlu melakukan penghematan pembiayaan dan alokasi pos anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah sehingga dapat mewujudkan prinsip *Value Of Money* yang ekonomis. Dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah dalam merealisasi pendapatan daerah harus lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan, perlunya dilakukan penggalan sumber-sumber baru pendapatan daerah untuk optimalisasi perolehan PAD sehingga mampu menekan besaran bantuan dana dari pusat, serta peningkatan alokasi Belanja Modal terkait pengadaan sarana dan prasarana ekonomi serta pelayanan publik dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan yang dipaparkan berdasarkan dengan data yang didapat dimana menunjukkan masih signifikannya ketergantungan pemerintah daerah provinsi Jambi terhadap dana dari pusat, maka menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada, sebagai berikut :

- 1) Menurunnya anggaran dan realisasai dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.
- 2) Realisaasi agregat APBD belum optimal dari total anggaran yang diberikan dari pusat.
- 3) Masih signifikannya ketergantungan pemerintah daerah Provinsi

¹³ Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*, 1 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Hal.30.

Jambi terhadap dana dari pusat

- 4) Masih besarnya pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam total pendapatan daerah
- 5) Realisasi agregat PAD dalam 4 tahun terakhir masih naik-turun dan belum konsisten.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar penelitian ini lebih intensif dan spesifik adalah :

- 1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan data anggaran keuangan provinsi jambi
- 2) Periode penelitian dilakukan peneliti adalah tahun 2017-2020
- 3) Rasio yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan pengukuran indeks kinerja keuangan pemerintah

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi Peiode tahun 2017-2020?
- 2) Apakah kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020 sudah efektif?
- 3) Apakah kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020 sudah efisien?
- 4) Bagaimana tingkat pertumbuhan kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi Periode tahun 2017-2020?
- 5) Bagaimana tingkat aktivitas kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi Perode tahun 2017-2020?
- 6) Bagaimana kategori kinerja keuangan Provinsi Jambi secara umum periode tahun 2017-2020?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020
- 2) Mengetahui tingkat efektifitas kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020
- 3) Mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020
- 4) Mengetahui tingkat pertumbuhan kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020
- 5) Mengetahui tingkat aktivitas kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi periode tahun 2017-2020
- 6) Mengetahui kategori kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi secara menyeluruh dalam periode tahun 2017-2020

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan secara teoritis bagi ilmu pengetahuan mengenai laporan kinerja keuangan daerah dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi terkhusus mata kuliah akuntansi sector public untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Kegunaan Empiris/Praktis
 - Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan daerah serta hasilnya dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang sama.
 - Bagi pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah penelitian.

BAB II : Kerangka Teori dan Kerangka Berpikir

Bab ini menjelaskan kerangka teori, teori hubungan antar variabel, tinjauan pustaka dan kerangka kerja.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode survei yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel survei dan definisi operasional masing-masing variabel, metode analisis data dan lainnya.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang pokok bahasan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Landasan Teori

a) *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.¹⁴

Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan dan kolektif dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam akuntansi sektor publik.

Impilkasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat

¹⁴Donaldson,L., & Davis, J.H, Stewardship Theory Or Agency Theory : CEO Governance And Shareholder Returns (1991), *Australian Journal of Management*, 16:49-64

pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

b) Landasan Al-Qur'an

Berdasarkan Al-Qur'an Surah n-Nisa' ayat 58 yang menjelaskan mengenai amanah dan tanggung jawab seorang muslim. Kata amanah mempunyai akar kata iman dan aman, sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Amanah juga termasuk yang menyangkut hak-hak Allah SWT atas hamba-hamba-Nya yang dipercaya kepada seseorang yang berupa titipan. Oleh karena suatu titipan hendaknya ditunaikan kepada yang berhak menerimanya .

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.¹⁵

Ibnu Tamiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang kompeten untuk melaksanakan pekerjaan itu. Pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan yang dijalankan itu tidak semata-mata disaksikan oleh publik, tetapi Allah melihat bagaimana pemimpin itu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mampu bertanggung-jawab dengan apa yang telah dilaksankannya.

2. Bidang Akuntansi

a) Akuntansi sektor publik

Akutansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan

¹⁵ Tafsir Al-Tabari (Ath-Thabari), "Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an."

sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹⁶

Akutansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggung jawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya. Akutansi sektor publik sering disebut sebagai akutansi dana karena kekhasan dalam fokus pencarian sumber dan alokasi dana dari dan untuk publik. Sedangkan pertanggung jawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akutansi sektor publik, anggaran merupakan *focal point* sebagai landasan operasional organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan, organisasi publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan. Sehingga sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah *mandatory*.¹⁷

Akutansi merupakan bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditunjukkan pada organisasi publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakberpihakan pada golongan dan prediktabilitas isu yang menjadi perhatian pada reformasi organisasi publik saat ini dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif adalah implementasi *new public management* (MPM) untuk mencapai kinerja organisasi secara optimal.¹⁸

1) Anggaran sektor publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran yaitu sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

¹⁶ Dadang Solihin, *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah* (Jakarta: PT Arifa Duta Prakarsa, 2006), Hal. 42.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hamzah dan Kustiani, *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*, (Tangerang Selatan : STAN Press, 2014) Hal. 17.

- i. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.¹⁹
- ii. Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.²⁰
- iii. Sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.²¹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakandata masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Mardiasno mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sector public adalah sebagai berikut²²:

- a) Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan management untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan Tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
- b) Anggaran sebagai alat pengendalian

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), Hal. 27.

²⁰ Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), Hal. 22.

²¹ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal. 19.

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), Hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*misappropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
 - Menghitung selisih anggaran
 - Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians
 - Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
- c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
- Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi
- d) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahapan pelaksanaan anggaran adalah Sebagian dari prosedur anggaran yang dimulai dari penyusunannya sampai dengan pertanggung-jawaban atasnya, yang keseluruhannya dikenal dengan nama siklus anggaran (*budget cycles*). Siklus anggaran terdiri dari:

- a) Tahapan persiapan anggaran oleh badan eksekutif
- b) Tahapan pengesahan anggaran oleh badan legislatif.
- c) Tahapan pelaksanaan anggaran oleh badan eksekutif, termasuk pelaporan pelaksanaan dan pengawasan atasnya.²³

Sebelum suatu periode anggaran dimulai, pihak eksekutif menyiapkan suatu rencana anggaran belanja untuk membiayai segala kegiatannya yang akan dilaksanakannya serta rencana sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi pembiayaan tersebut, yang akan diajukan kepada badan legislatif.

Berbagai cara penyusunan anggaran sesuai dengan perkembangannya hingga saat ini dikenal sebagai:²⁴

- i. Penyusunan anggaran berdasarkan objek (*line items budgetting*)

Anggaran belanja yang hanya membuat daftar barang dan kebutuhan dengan nilainya dan dikelompokkan dalam golongan-golongan sejenis dikenal dengan sebutan line items budgetting.

- ii. Penyusunan anggaran berdasarkan program (*program budgetting*)

Suatu anggaran yang berorientasi kepada maksud dan tujuan pembelanjaan dikenal dengan nama program *budgetting*. Program budgetting memberi kemungkinan memilih prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk keperluan pengawasan sering dikombinasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²³ Rosjidi, *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode* (Surabaya: Aksara Satu, 2001), Hal. 21.

²⁴ Kustandi Arinta, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), Hal.12.

dengan cara: anggaran program dengan perincian line items.

- iii. Penyusunan anggaran berdasarkan hasil kerja (*performance budgeting*)

Apabila dalam budget dikemukakan pula data-data hasil kerja yang akan dihasilkan (*output*), maka anggaran demikian dikenal dengan *performance budgeting*. Pada umumnya *performance-budgeting* merupakan program budgeting dengan perincian line-items disertai data-data hasil kerja yang akan dihasilkan setiap unit.

- iv. Penyusunan anggaran dengan system perencanaan, penyusunan program dan anggaran (*planning, programming and budgeting system*), dikembangkan sebagai usaha memperbaiki ketiga sistem tersebut, dengan memperhitungkan suatu kaitan dengan rencana pemerintahan yang lebih Panjang.

Sesuai perhitungan dan pengkompilasian data, maka disusunlah naskah usul anggaran yang akan diajukan kepada badan legislative dalam bentuknya: budget document.

b) Akuntansi pemerintahan

1) Pengertian

Pada hakikatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanent pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan penganalisaan, pencatatan, penyimpulan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelaporan, dan penginterpretasian transaksi-transaksi unit dan agensi pemerintahan.²⁵

2) Tujuan

Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan (*financial information*) mengenai pemerintahan di semua tingkatan dan unitnya yang ada.

c) Akuntansi keuangan daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.²⁶

3. Analisis pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja keuangan merupakan manifestasi keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi prestasi keuangan pada masa lalu berdasarkan laporan keuangan perusahaan sehingga memperbaiki laba perusahaan.²⁷

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja suatu organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan proses suatu organisasi. Pengukuran kinerja juga membantu dalam formulasi dan revisi strategi organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁵ Kustadi Arinta, *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990) Hal. 11.

²⁶ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, 4 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 43.

²⁷ Mulyadi *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal. 183.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.²⁸

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengelokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.²⁹

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial.³⁰

a) Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

²⁸ Halim dan Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, hal.

²⁹ Dadang Solihin, *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT Artifa Duta Prakarsa, 2006), Hal. 37.

³⁰ Ihyaul Ulum, *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Hal. 21.

- 1) Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *botton up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.³¹

b) Manfaat Pengukuran Kinerja

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan Tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 8) Mamastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³¹ Suhardi, *Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP*, hal. 44.

³² *ibid*, hal. 45.

4. Rasio keuangan daerah

Rasio keuangan adalah suatu analisis yang membandingkan suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya yang dapat membantu menilai status atau kondisi perusahaan saat ini. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara proyek tertentu dengan proyek lainnya. Penyederhanaan ini memungkinkan penilaian cepat terhadap hubungan antara item-item tersebut dan dapat dibandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Rasio keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan prestasi untuk kemajuan dalam pemerintah maupun perusahaan.³³

a. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman. Bantuan pemerintah pusat dalam konteks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



³³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 231.

otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).³⁴

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan dengan daerah terhadap sumber dana ekstren. Semakin tinggi rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.³⁵

Tabel 2.1 Keriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

b. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Guna

³⁴ Ulum, *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*, hal. 31.

³⁵ *ibid*, hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.³⁶

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut;

Table 2.2 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

c. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.³⁷

Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui kegiatan tersebut efisien atau tidak.³⁸

³⁶ *ibid*, hal. 32.

³⁷ Ulum, hal. 32.

³⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 232.

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja APBD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu priode ke priode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.³⁹

e. Rasio Aktifitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentasi belanja investasi (belanja bangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.⁴⁰

f. Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam penelitian Ahmad Soleh mengemukakan konsep dan metode analisis dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah yaitu pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah (IKKP),

³⁹ Ulum, *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*, hal. 33.

⁴⁰ *ibid*, hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari penjumlahan Ketergantungan Fiskal (KF), Kemampuan Penciptaan Pendapatan (KPC), Proporsi Belanja Modal (PBM), Dan Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP).

Asumsi penilaian terbaik dalam interpretasi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut⁴¹ :

- Ketergantungan Fiskal *nilai terbaik = 100
- Kapasitas Penciptaan Pendapatan *nilai terbaik = 10
- Proporsi Belanja Modal *nilai terbaik = 60
- Kontribusi Sektor Pemerintah *nilai terbaik = 20

Tabel 2.4 Kategori Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah

Kategori	Nilai Kinerja keuangan
Tidak Baik	<20
Kurang Baik	>20-30
Cukup Baik	>30-40
Baik	>40-50
Sangat Baik	>50

5. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴¹ Ahmad Soleh, "Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi," Jurnal Defelopment 2012, Hal 63-64.

pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁴²

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBD berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.⁴³

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cabang, dan peningkatan jaminan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴² Anik Yuesti, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik* (Bali: CV Noah Aletheia, 2020), Hal. 49.

⁴³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2002) hal. 48.

b. Sistematika APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

- 1) Pendapatan, terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pertimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- 2) Belanja, terdiri dari : Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi hasil dan Bantuan keuangan, Belanja tak tersangka.
- 3) Pembiayaan meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.⁴⁴

c. Proses Penyusunan APBD

- 1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disertai penjelasan dan dokumen pendukung nya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.
- 2) Setelah disetujui oleh DPRD, APBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah yang diajukan, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.⁴⁵

d. Pelaksanaan APBD

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah menyusun Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat

⁴⁴ nik Yuesti, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti, *Akuntansi Sektor Publik* (Bali: CV Noah Aletheia, 2020), hal. 50.

⁴⁵ *ibid*, hal. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Penyesuaian APBD dilakukan jika terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- 4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.⁴⁶

B. Studi Relevan

Studi relevan merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini yang kajiannya memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian.

Table 2.5 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian, Nama Penelitian, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Analisis Rasio	Analisis	1. rasio efektifitas dikategorikan

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 53.

	Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Hery Susanto, 2019	Deskriptif Kuantitatif	efektif 2. rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, 3. rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, 4. rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, 5. komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, 6. pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. ⁴⁷
2	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Priscilia Putri Utami Mailangkay, Sri Murni, Paulina Van Rate. 2020	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung masih rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Bitung harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. ⁴⁸
3	Analisis Rasio Keuangan Anggaran	Kualitatif Deskriptif	1. pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif.

⁴⁷ Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Journal of Management and Business*, Vol.7 (25 Maret 2019), Hal. 90.

⁴⁸ P P U Mailangkay, S Murni, dan P V Rate, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung," *Jurnal MBA*, Vol.8 No.3 (2020), Hal. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



	Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015 Juddy Julian Pilat, Jenny Morasa, 2017		<p>Kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah</p> <p>2. Tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado terbilang efektif dan sangat efisien.</p> <p>3. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang.</p> <p>4. kondisi kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan share dan growth terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015⁴⁹</p>
4	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah	Deskriptif Kualitatif	1. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2018, pendapatan daerah menunjukkan kurang baik, dimana pemerintah daerah belum mampu dalam penyelenggaraan

⁴⁹ Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015," *ACCOUNTABILITY* 6, no. 1 (20 Juni 2017): hal. 53, <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2016-2018)		desentralisasi
	Sanchia Darlene Rawis, Dkk. 2020		<ol style="list-style-type: none"> 2. efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan cukup efektif dan mampu dalam memobilisasikan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang ditargetkan. belanja daerah menunjukkan terdapat selisih kurang dari jumlah anggaran secara umum dinilai baik, 3. pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan secara positif dan jumlah kenaikan yang didapat masih terbilang wajar, 4. belanja operasi terhadap total belanja masuk dalam kategori kurang serasi, belanja modal terhadap total belanja masuk dalam kategori tidak serasi 5. efisiensi belanja daerah menunjukkan rasio efisiensi kurang dari 100% yang artinya pemerintah sudah melakukan penghematan anggaran belanjanya maka dikategorikan efisien.⁵⁰
5	Analisis Kinerja Keuangan Dengan	Analisis Kualitatif	1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ogan

⁵⁰ S D Rawis, H Manosoh, dan R J Pusung, "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2016-2018)," Jurnal MBA Vol.8 No.4 (2020), Hal. 813.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



	<p>Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ok)</p> <p>Lilis Atmawati, 2013</p>	<p>dan Kuantitatif (<i>Mix Methode</i>)</p>	<p>Komering Ilir belum cukup memadai ini berarti menggambarkan kemandirian keuangan daerah dinilai belum cukup mandiri. Karena bantuan dari Pemerintah Pusat lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p> <p>2. Efektivitas pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan tugasnya sangat efektif.</p> <p>3. Kinerja pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2008 sampai tahun 2012 dinilai sudah efisien.⁵¹</p>
--	---	---	--

Perbedaan Penelitian Terdahulu

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dijadikan rujukan penulis selain dari objek yang berbeda, adalah pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada analisis kinerja keuangan dengan rasio keuangan daerah sesuai indikator yang ada tanpa menjelaskan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menambahkan Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah dalam menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah secara umum dan menyeluruh selama total periode yang diteliti.

⁵¹ Lilis Atmawati, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)," (2013), Hal. 82-83.

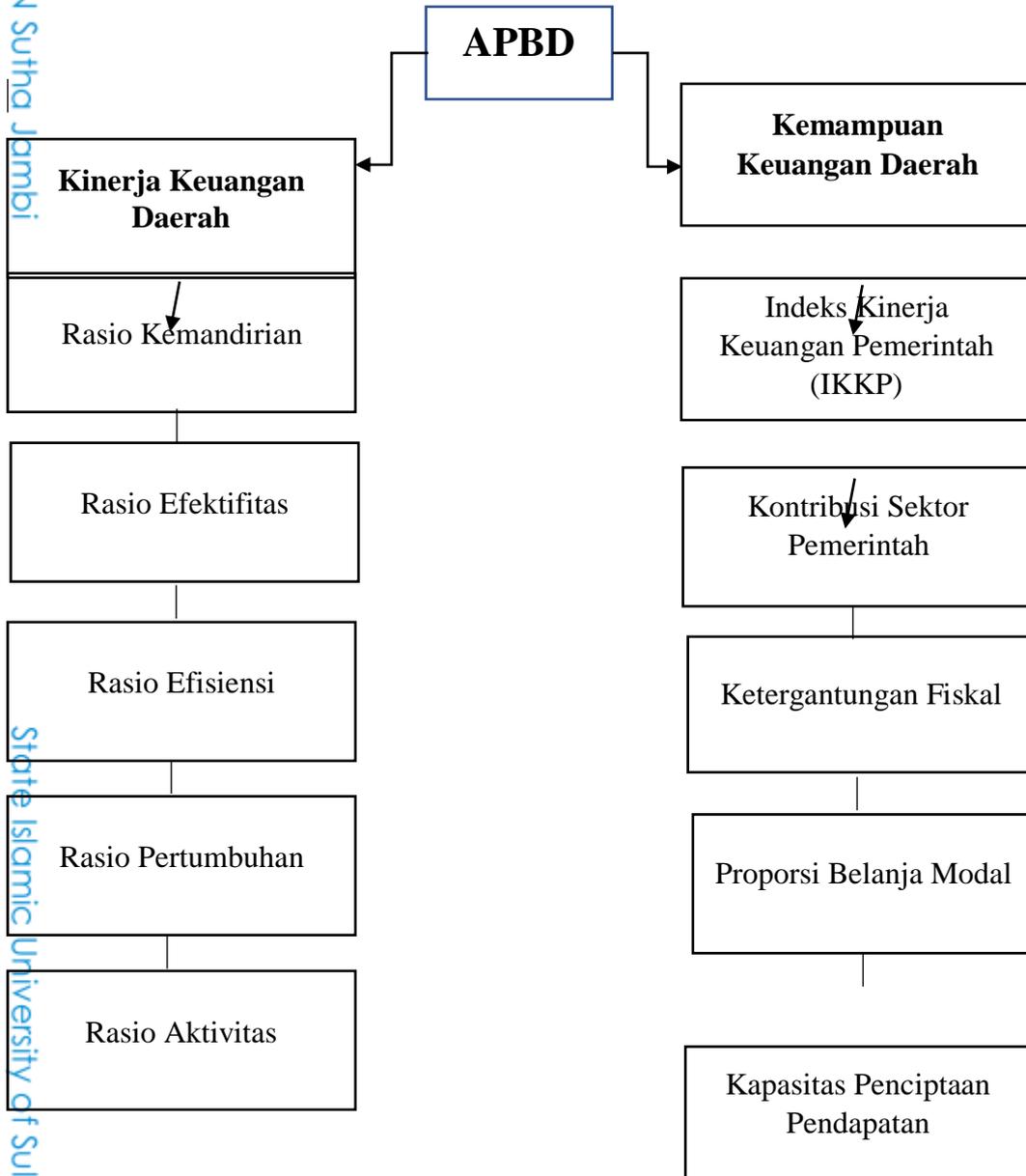


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran berikut



Gambar 2.1
kerangka Berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerangka pemikiran yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari komponen kinerja keuangan diatas dapat dilakukan proses perhitungan analisis dengan menggunakan alat analisis Rasio Keuangan Daerah yang meliputi : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Aktivitas.
2. Dari kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh dapat diukur melalui proses perhitungan dengan menganalisis melalui Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil rata-rata dari perhitungan berikut : Kontribusi Sektor Pemerintah, Ketergantungan Fiskal, Proporsi Belanja Modal, Dan Kapasitas Penciptaan Pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah provinsi Jambi, namun penelitian ini tidak berpusat disatu tempat karena data penelitian ini dari data skunder yang diperoleh dari *website*.

B. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan rasio keuangan dan mendeskripsikan hasil perhitungan sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan⁵².

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yaitu data yang disajikan berupa rangkaian data yang diukur selama kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2017-2020 Provinsi Jambi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan data sekunder pada penelitian ini berupa laporan anggaran dan realisasi APBD tahun 2017-2020 Provinsi Jambi yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah di publish di website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka dan penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 19.

D. Definisi operasional variable

Table 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indicator	Skala
1	Tingkat Kemandirian Kinerja Keuangan	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Bantuan Pusat dan Pinjaman	Rasio
2	Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan	Perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.	1. Biaya Pemungutan PAD 2. Realisasi Penerimaan PAD	Rasio
3	Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan	Kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan dengan riil daerah.	1. Realisasi Penerimaan PAD 2. Target penerimaan PAD	Rasio
4	Tingkat Pertumbuhan Kinerja Keuangan	Kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

		keberhasilan yang telah dicapai dari satu priode ke priode berikutnya.		
5	Tingkat Aktifitas Kinerja Keuangan	Kemampuan pemerintah daerah memprioritaskan alokasi danannya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.	1. Total Belanja Rutin 2. Total Belanja Pembangunan 3. Total APBD	Rasio
	Indek Kinerja Keuangan Pemerintah	Metode analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja keuangan secara umum.	1. Ketergantungan Fiskal 2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan 3. Proporsi Belanja Modal 4. Kontirbusi Sektor Pemerintahan	Rasio

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kuantitatif dinyatakan dalam angka-angka yang dapat dihitung dengan rumus statistik.⁵³ Dalam penelitian ini metode analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dari perhitungan dengan membandingkan teori yang sesuai dengan masalah yang digunakan dalam peneltian ini, metode ini menyajikan data dalam bentuk angka, table, dan uraian mengenai rasio keuangan daerah. selanjutnya metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah

⁵³ Atmawati, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)," Hal. 37.

metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data-data yang telah terkumpul dianalisis, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa laporan keuangan dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan mengukur:

a) Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,

Rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan penerimaan pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah,

Rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Pemungutan PAD}} \times 100\%$$

4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rumus :

⁵⁴ Mailangkay, Murni, dan Rate, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung," Hal. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t1 - \text{Pendapatan } t0}{\text{Pendapatan } t0} \times 100\%$$

Keterangan :

t1 = tahun yang dihitung,

t0 = tahun sebelumnya.

5) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rumus :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

b) Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Dalam metode analisis pengukuran kinerja keuangan Provinsi Jambi periode 2017-2020 digunakan model Indeks Pengukuran Kinerja Pemerintah (IKKP), Pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari :

- Ketergantungan Fiskal (KF)
- Kemampuan Penciptaan Pendapatan (KCP)
- Proporsi Belanja Modal (PBM)
- Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Adapun model yang digunakan untuk mengukur Indeks Kinerja Keuangan adalah:

$$\text{IKKP} = \frac{(100 - \text{KF}) + \text{KCP} + \text{PBM} + \text{KSP}}{4}$$

1) Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi (KF)

Dengan nilai diperoleh dari :

$$\text{KF} = \frac{\text{DAU} (-\text{Belanja Pegawai})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Kapasitas Penciptaan Pendapatan Provinsi Jambi (KPC)

Dengan nilai diperoleh dari :

$$\text{KPC} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100$$

3) Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi (PBM)

Dengan nilai diperoleh dari :

$$\text{PBM} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

4) Kontribusi Sektor Pemerintah Provinsi Jambi (KSP)

Dengan nilai diperoleh dari :

$$\text{KSP} = \frac{\text{Total Belanja Pemerintah}}{\text{PDRB}} \times 100$$

3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini Adalah Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Unit pengamatan yang ditetapkan adalah pemerintah provinsi jambi dan unit analisisnya adalah aparat yang bertanggung jawab menyusun anggaran pada setiap satuan kerja.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada $0^{\circ}45'-2^{\circ}45'LS$ dan $101^{\circ}10'-104^{\circ}55'$ BT di bagian tengah Pulau Sumatra, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai produk yang dihasilkan pada suatu daerah dalam waktu tertentu.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam melalui suatu proses produksi. Keterbatasan untuk menyediakan faktor produksi tersebut menyebabkan struktur PDRB bervariasi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur persentasi dari perkembangan suatu perekonomian dari periode ke periode selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Perkembangan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB harus tumbuh lebih baik terlebih dalam menghadapi proses pembangunan daerah yang berkembang. Secara makro sektoral atau berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi yang membentuk perekonomian hingga tahun 1990 masih Agraris saat ini berubah berstruktur industri. Artinya sebelum tahun 1990 indonesia masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memiliki sektor pertanian yang sangat tinggi sebagai penyumbang pendapatan, namun saat ini sektor pertanian semakin menurun dan sektor industri semakin meningkat produksinya.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB dari sektor ekonomi yang awalnya dominan diganti dengan sektor ekonomi lainnya. Pada awalnya PDRB menurut lapangan usaha 2009 terdiri dari 9 sektor namun sejak Februari 2015 BPS menghitung PDRB berdasarkan tahun 2010 yang terdiri dari 17 sektor. 17 sektor tersebut terdiri dari (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan pengolahan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik dan gas, (5) pengadaan air, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan, (12) real estate, (13) jasa perusahaan (14) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (17) jasa lainnya

Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sekitar 30,88%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,59%, Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,24% dan industri pengolahan sebesar 9,86%. Namun diketahui bahwa kebergantungan Provinsi Jambi terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai komoditas utama beserta kegiatan turunannya.⁵⁵

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Provinsi Jambi sampai tahun 2020 dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa dan diikuti oleh Konsumsi Rumah Tangga. Komoditas perkebunan dan pertambangan sebagai sumber ekonomi utama, sebagian besar kinerja ekspor memberikan dampak positif kepada penerimaan masyarakat Provinsi Jambi karena terjaganya harga global. Sementara itu komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Komponen lain yang berperan besar terhadap Produk Regional

⁵⁵ jambiprov.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Domestik Bruto (PDRB) adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir PDRB Provinsi Jambi.

B. Hasil Penelitian

Secara garis besar yang dibahas dalam bab ini yaitu kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dalam merealisasikan pendapatan daerah. Analisis rasio keuangan terdiri dari 6 bagian yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio efisiensi keuangan daerah, analisis rasio efektivitas keuangan daerah, analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah, analisis rasio aktivitas keuangan daerah, dan analisis rasio DSCR. Berikut ini akan disajikan beberapa tabel dan perhitungannya sebagai berikut :

1) Analisis Rasio Kemandirian

Rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksteren. Keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari luar⁵⁶.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerinta Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio kemandirian keuangan provinsi jambi untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Kemandirian

(dalam bentuk miliar)

Tahun	PAD	Bantuan pemerintah pusat
2017	2.859,65	13.622,05
2018	1.656,57	2.754,35
2019	1.651,09	2.922,49

⁵⁶ Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, hal. 27.

2020	1.535,18	2.862,89
------	----------	----------

Sumber : *djpk.kemenkeu.go.id*

Tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{2.859,65}{13.622,05} \times 100 \\ &= 20,99 \% \end{aligned}$$

Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{1.656,57}{2.754,35} \times 100 \% \\ &= 60,14 \% \end{aligned}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{1.651,09}{2.922,49} \times 100 \% \\ &= 56,49 \% \end{aligned}$$

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{1.535,18}{2.862,89} \times 100 \% \\ &= 53,62 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Persentase Hasil	Tingkat Kemandirian
2017	20,99 %	Sedang
2018	60,14 %	Sangat Baik
2019	56,62 %	Sangat Baik
2020	53,62 %	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah Penulis, 2022

Dari tabel 4.2 diketahui hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi adalah :

1. Tahun 2017 persentase tingkat kemandirian sebesar 20,99% ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi itu sedang dan menjelaskan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah masih bergantung dengan bantuan dari pusat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pada tahun 2018 persentase tingkat kemandirian sebesar 60,14 % dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hasil ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi sudah sangat baik dan tidak terlalu bergantung lagi dengan dana dari pusat.
3. Untuk tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan daerah 56,62% dan mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, namun tingkat kemandirian untuk tahun ini masih berada ditingkat yang sangat baik.
4. Dan di tahun 2020 tingkat kemandirian kembali mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dengan hasil 53,62% yang menunjukkan ditahun ini tingkat kemandirian masih sangat baik.

2) Analisis Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibanding kan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah⁵⁷.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah Provinsi Jambi untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Efektifitas

(dalam bentuk miliar)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD
2017	2.859,65	2.473,81
2018	1.656,57	1.494,53
2019	1.651,09	1.524,64
2020	1.535,18	1.665,33

Sumber : djk.kemenkeu.go.id

⁵⁷ *ibid*, hal. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{2.859,65}{2.473,81} \times 100\% \\ &= 116\% \end{aligned}$$

Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{1.656,57}{1.494,53} \times 100\% \\ &= 111\% \end{aligned}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{1.651,09}{1.524,64} \times 100\% \\ &= 108\% \end{aligned}$$

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{1.535,18}{1.665,33} \times 100\% \\ &= 92\% \end{aligned}$$

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Persentase Hasil	Tingkat Efektifitas
2017	116%	Sangat Efektif
2018	111%	Sangat Efektif
2019	108%	Sangat Efektif
2020	92%	Efektif

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.6 digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarka potensi riil daerah, berikut analisi dari rasio efektivitas keuanga daerah :

- a. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Provinsi Jambi yaitu tepatnya diawali pada tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 116% menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi sudah sangat efektif dimana realisasi penerimaan lebih besar dari target yang ditetapkan.

- b. Tahun 2018 rasio efektifitas menurun menjadi 111% namun realisasi penerimaan tetap mampu melampaui dari target penerimaan yang ditetapkan, dengan hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas di tahun 2018 sudah sangat efektif.
- c. Tahun 2019 kembali terjadi penurunan terhadap rasio efektifitas menjadi 108% namun masih menunjukan tingkat kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi Masih sangat efektif dimana realisasi penerimaan masih lebih besar dari target yang ditetapkan.
- d. Di tahun 2020 terjadi penurunan rasio efektifitas yang signifikan dimana tingkat rasio berada di bawah 1 atau kurang dari 100 yakni sebesar 92% hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan, namun tingkat kinerja keuangan daerah pada tahun 2020 ini masih tergolong efektif.
- e. Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa tingkat efektifitas menurun setiap tahunnya selama periode tahun penelitian

3) Analisis Rasio Efisiensi

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD ialah belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.⁵⁸

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio efisiensi keuangan Profinsi Jambi untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Efisiensi

(dalam bentuk miliar)

Tahun	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD
-------	----------------------	--------------------------

⁵⁸ *ibid.*

2017	9.527,98	2.859,65
2018	2.245,56	1.656,57
2019	2.406,64	1.651,09
2020	2.134,61	1.535,18

Sumber : *djpk.kemenkeu.go.id*

Tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{9.527,98}{2.859,65} \times 100\% \\ &= 333\% \end{aligned}$$

Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{2.245,56}{1.656,57} \times 100\% \\ &= 135\% \end{aligned}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{2.406,64}{1.651,09} \times 100\% \\ &= 145\% \end{aligned}$$

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{2.134,61}{1.535,18} \times 100\% \\ &= 139\% \end{aligned}$$

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Persentase Hasil	Tingkat Efisiensi
2017	333%	Tidak Efisien
2018	135%	Tidak Efisien
2019	145%	Tidak Efisien
2020	139%	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah penulis 2022

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisien tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi selama periode tahun penelitian berada pada kategori tidak efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4) Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari priode ke priode lainnya.⁵⁹

Tabel 4.7 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Pertumbuhan

(dalam bentuk miliar)

Tahun	Penerimaan PAD	Realisasi Pendapatam
2016	2.227,60	15.868,41
2017	2.859,65	17.269,10
2018	1.656,57	4.412,46
2019	1.651,09	4.575,19
2020	1.535,18	4.400,62

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

$$a) \text{ Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD\ t1 - PAD\ t0}{PAD\ t0} \times 100\%$$

(PADt1 = PAD tahun yang dihitung, PADt0 = PAD tahun sebelumnya)

Tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{2.859,65 - 2.227,60}{2.227,60} \times 100\% \\ &= 28,37\% \end{aligned}$$

Tahun 2018 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{1.656,57 - 2.859,65}{2.859,65} \times 100\% \\ &= (42,07\%) \end{aligned}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{1.651,09 - 1.656,57}{1.656,57} \times 100\% \\ &= (0,33\%) \end{aligned}$$

Tahun 2020 :

⁵⁹ *ibid*, hal. 29.

$$\begin{aligned}\text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{1.535,18 - 1.651,09}{1.651,09} \times 100\% \\ &= (7,02\%)\end{aligned}$$

Ttabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Persentase Hasil	Kinerja
2017	28,37%	Positif
2018	(42,07%)	Negatif
2019	(0,33%)	Negatif
2020	(7,02%)	Negatif

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

Pada tabel 4.8 diatas, rasio pertumbuhan pada tahun 2016/2017 sebesar 28,37% sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan dengan tahun 2018 terjadi defisit sebesar 42,07%, tahun 2019 dengan defisit sebesar 0,33% dan untuk tahun 2020 terjadi defisit sebesar 7,02%.

b) Rasio Pertumbuhan total pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan } t1 - \text{Pendapatan } t0}{\text{Pendapatan } t0} \times 100\%$$

Keterangan :

t1 = tahun yang dihitung,

t0 = tahun sebelumnya.

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan total pendapatan tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{17.269,10 - 15.868,41}{15.868,41} \times 100\% \\ &= 8,83\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{4.412,46 - 17.269,10}{17.269,10} \times 100\% \\ &= -74,45\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{4.575,19 - 4.412,46}{4.412,496} \times 100\% \\ &= 3,69\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{4.400,62 - 4.575,19}{4.575,19} \times 100\% \\ &= -3,82\% \end{aligned}$$

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Persentase Hasil	Pertumbuhan
2017	8,83%	Positif
2018	-74,45%	Negatif
2019	3,69%	Positif
2020	-3,82%	Negatif

Sumber : data diolah penulis, 2022

Berdasarkan pada hasil perhitungan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, persentase pertumbuhan total pendapatan senilai 8,83% hal ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, di tahun 2018 persentase pertumbuhan total pendapatan mengalami penurunan senilai -74,45% yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif atau mengalami defisit dari pertumbuhan total pendapatan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 persentase pertumbuhan total pendapatan senilai 3,69% meningkat dari tahun sebelumnya yang menggambarkan pertumbuhan yang positif, dan untuk tahun 2020, persentase pertumbuhan total pendapatan kembali mengalami penurunan senilai -3,82% yang menunjukkan pertumbuhan negatif karena terjadinya defisit pendapatan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tahun periode penelitian pertumbuhan total pendapatan tidak konsisten karena selalu mengalami pertumbuhan yang naik turun.

5) Analisis Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara proporsional dan optimal. Semakin tinggi persentase



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

anggaran yang dialokasikan berarti persentase belanja pembangunan (modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Adapun rumusnya sebagai berikut :⁶⁰

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio aktivitas keuangan daerah Provinsi Jambi untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Data APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator Rasio Aktivitas

(dalam bentuk miliar)

Tahun	Belanja		APBD
	Rutin/Operasi	Pembangunan/Modal	
2017	9.542,55	3.913,99	16.872,74
2018	2.246,06	784,72	4.198,26
2019	2.407,14	866,50	4.824,37
2020	2.135,16	642,70	4.430,39

Sumber : djk.kemenkeu.go.id

a) Rasio Belanja Rutin

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.542,55}{16.872,74} \times 100\%$$

⁶⁰ *ibid*, hal. 30.

$$= 56,56\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{2.246,06}{4.198,26} \times 100\%$$

$$= 53,50\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.407,14}{4.824,37} \times 100\%$$

$$= 49,90\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{2.135,16}{4.430,39} \times 100\%$$

$$= 48,19\%$$

b) Rasio Belanja Pembangunan

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.913,99}{16.872} \times 100\%$$

$$= 23,20\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{784,72}{4.198,26} \times 100\%$$

$$= 18,69\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{866,50}{4.824,37} \times 100\%$$

$$= 17,96\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{642,70}{4.430,39} \times 100\%$$

$$= 14,51\%$$

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

Tahun	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan
2017	56,56%	23,20%
2018	53,50%	18,69%
2019	49,90%	17,96%
2020	48,19%	14,51%

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.10 dapat dianalisis sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Pada tahun anggaran 2017 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD sebesar 56,56% dan rasio pembangunan terhadap APBD sebesar 23,20% menggambarkan bahwa ditahun ini tingkat aktivitasnya lebih memprioritaskan belanja rutin dibanding dengan belanja pembangunan.
- b. Di tahun 2018 persentasi rasio belanja rutin terhadap APBD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 53,50% dan rasio pembangunan juga mengalami penurunan menjadi 51,56%. Hal ini masih menunjukkan tingkat aktivitas yang masih meprioritaskan belanja rutin dibanding dengan belanja pembangunan.
- c. Di tahun 2019 persentase rasio belanja rutin terhadap APBD kembali mengalami penurunan menjadi 49,90%, rasio belanja pembangunan juga kembali mengalami penurunan menjadi 17,96%. tingkat aktivitas sama dengan sebelumnya dimana belanja rutin lebih diprioritaskan terhadap belanja ruti dibanding dengan belanja pembangunan.
- d. Pada tahun 2020 kedua rasio kembali mengalami penurun baik rasio belanja rutin menjadi 48,19% dan belanja pembanguan menjadi 14,51%.

6) Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 4.12 Data APBD Provinsi Jambi berdasarkan Indikator Pengukuran Indeks Kinerja Keuangan

(Dalam bentuk Milliar)

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Produk Domestik Ragonal Bruto (PDRB)	189,79	207,88	217,06	206,85
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.397,91	1.399,37	1.433,20	1.444,17
Pendapatan Daerah	17.269,10	4.412,46	4.575,19	4.400,62
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.859,65	1.656,57	1.651,09	1.535,18
Belanja Modal	3.913,99	784,72	866,50	642,70
Belanja Pegawai	6.058,95	1.303,79	1.382,61	1.391,32
Belanja Daerah	16. 872,74	4.198,37	4.824,37	4.400,62
Belanja Pemerintah	4.503,49	4.515,14	5.244,69	5.244,84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Sumber : BPS.co.id, dan djpk.kemenkeu.go.id

Perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

a) Kebijakan Fiskal

Angka ketergantungan fiskal terhadap keuangan daerah bersifat negatif artinya semakin besar nilainya maka semakin tidak baik bagi keuangan daerah, maka untuk menyamakan dengan variabel lainnya yang bersifat positif, harus dikonversi dengan mengurangi angka 100 terhadap angka ketergantungan fiskal.⁶¹

$$FK_{2017} = \frac{1.397,91 - 6.0588,95}{17.269} \times 100 = 73$$

$$KF_{2018} = \frac{1.399,37 - 1.303,79}{4.575,19} \times 100 = 98$$

$$KF_{2019} = \frac{1.433,20 - 1.382,17}{4.575,19} \times 100 = 99$$

$$KF_{2020} = \frac{1.444,17 - 1.391,32}{4.400,62} \times 100 = 99$$

b) Kapasitas Penciptaan Pendapatan

$$KPC_{2017} = \frac{2.859,65}{189,78} \times 100 = 15$$

$$KPC_{2018} = \frac{1.656,57}{207,88} \times 100 = 8$$

$$KPC_{2019} = \frac{1.651,09}{217,06} \times 100 = 7,6$$

$$KPC_{2020} = \frac{1.535,18}{206,85} \times 100 = 7,4$$

c) Proporsi Belanja Modal

$$PBM_{2017} = \frac{3.913,99}{16.872,74} \times 100 = 23,19$$

$$PBM_{2018} = \frac{784,72}{4.198,26} \times 100 = 18,68$$

$$PBM_{2019} = \frac{866,50}{4.824,37} \times 100 = 17,96$$

⁶¹Ahmad Soleh, "Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi," hal. 64.

$$PBM_{2020} = \frac{642,70}{4.430,39} \times 100 = 14,50$$

d) Kontribusi Sektor Pemerintah

$$KSP_{2017} = \frac{4.503,49}{189,79} \times 100 = 23,72$$

$$KSP_{2018} = \frac{4.515,14}{207,88} \times 100 = 21,72$$

$$KSP_{2019} = \frac{5.244,84}{217,06} \times 100 = 24,16$$

$$KSP_{2020} = \frac{5.244,84}{206,85} \times 100 = 25,36$$

e) Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

$$IKKP_{2017} = \frac{73+15+23,19+23,72}{4} = 33,73$$

$$IKKP_{2018} = \frac{98+8+18,68+21,72}{4} = 36,60$$

$$IKKP_{2019} = \frac{99+7,6+17,96+24,16}{4} = 37,18$$

$$IKKP_{2020} = \frac{99+7,4+14,50+25,36}{4} = 36,57$$

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah
Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2018

Tahun	KF	KPC	PBM	KSP	IKKP	Kriteria
2017	73	15	23,19	23,72	33,37	Cukup Baik
2018	98	8	18,68	21,72	36,60	Cukup Baik
2019	99	7,6	17,96	24,16	37,18	Cukup Baik
2020	99	7,4	14,50	25,36	37,18	Cukup Baik

Sumber : Data diolah Penulis, 2022

Pada tabel 4,13 kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Jambi berada pada kategori cukup baik di mana hasil rata-ratanya >30.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi selama periode 2017-2020. Berikut dengan menggunakan beberapa analisis rasio diantaranya rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas, dan perhitungan indeks kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan hasil. Perhitungan rasio-rasio tersebut, maka kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2020 dirangkum pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Provinsi Jambi Periode 2017-2020

Keterangan	Tahun Anggaran				Rata-rata (%)
	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	
Rasio Kemandirian	20,99	60,14	56,62	53,62	47,84
Rasio Efektifitas	116	111	108	92	106,75
Rasio Efisiensi	333	135	145	139	188
Rasio Pertumbuhan					
a. Rasio Pertumbuhan PAD	28,37	-42,07	-0,33	-7,02	-5,26
b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan	8,83	-74,45	3,69	-3,82	-16,55
Rasio Aktivitas					
a. Belanja Operasi	56,56	53,50	49,90	48,19	52,64
b. Belanja Pembangunan	23,20	10,69	17,96	14,51	18,59
Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah	33,37	36,60	37,18	36,57	35,18

Sumber : hasil olahan penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.12, berikut hasil analisa penulis :

1. Rasio Kemandirian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Selama kurun waktu empat tahun, rasio kemandirian provinsi jambi berada pada tingkat rata-rata 47,84% sehingga dapat dikatan berada pada kategori cukup mandiri walaupun kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, namun demikian keuangan daerah Provinsi Jambi sudah mulai mandiri dan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern semakin rendah.

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dia rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer daerah terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Dilihat pada tabel 4.1 jumlah PAD pada tahun 2017 senilai 2.859,65 lebih kecil dari nilai bantuan pemerintah pusat (dana transfer daerah) senilai 13.622,05 ini menggambarkan kecil nya tingkat kemandirian pada tahun tersebut namun pada hasil perhitungan rasio kemandirian masih berada pada kategori sedang dengan tingkat persentase 20,99%. Pada tahun 2018, nilai PAD menurun menjadi 1.656,57 dan nilai transfer daerah juga menurun menjadi 2.754,33. Meskipun PAD menurun dari tahun sebelumnya namun pada tahun ini membuktikan pemerintah mulai meningkatkan kemandiriannya dengan mengurangi ketergantungan dari transfer daerah, dengan demikian pada tahun 2018 dari perbandingan rasio PAD dengan rasio transfer menggunakan rasio tingkat kemandirian kinerja keuangan APBD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

provinsi Jambi berada pada kategori sangat baik dengan persentase 60,14%. Untuk tahun 2019 dan 2020 nilai rasio PAD mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai rasio PAD sebesar 1.651,09 dan tahun 2020 senilai 1.535,18. Sedangkan untuk rasio transfer mengalami peningkatan selama tahun 2019 dan 2020 dengan rasio transfer 2019 senilai 2.922,49 dan tahun 2020 senilai 2.862,89 hal ini menggambarkan pemerintah masih sedikit bergantung dengan dana transfer, namun dengan perhitungan rasio kemandirian, kinerja keuangan pemerintah berada pada kategori sangat baik karena persentase tahun 2019 sebesar 56,62% dan persentase tahun 2020 sebesar 53,62%.

Kemandirian Provinsi Jambi sudah bisa dikatakan sangat baik meskipun masih ada ketergantungan dari dana pemerintah pusat, untuk itu dalam mengatasi hal ini pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

Dalam hasil analisis tingkat kemandirian, hal ini sudah sesuai dengan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah mulai menjalankan tanggungjawabnya dalam melaksanakan dan mengatur kegiatan pemerintah daerah.

2. Rasio Efektivitas

Dari tabel menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Provinsi Jambi yang cukup baik, dengan hasil rata-rata 106,75% selama kurun waktu tahun anggaran 2017-2020. Kendati hasil rata-rata rasio efektifitas yang diperoleh menunjukkan kategori Sangat Efektif, namun terjadinya penurunan realisasi penerimaan. Realisasi penerimaan harus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pada upaya optimalisasi pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa anggaran PAD Provinsi Jambi mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 PAD dianggarkan sebesar 2.473,81 M. pada tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

anggaran PAD diturunkan menjadi 1.494,53 M. pada tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar 1.524,64 M. dan pada tahun 2020 anggaran PAD kembali dinaikkan sebesar 1.665,33 M.

Realisasi PAD Provinsi Jambi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar 2.859,65 M. pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 1.656,57 M. Pada tahun 2019 PAD kembali mengalami penurunan menjadi 1.651,09 M. dan untuk tahun 2020 PAD juga kembali mengalami penurunan sebesar 1.535,18 M.

Berdasarkan perhitungan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 116%, tahun 2018 sebesar 111%, tahun 2019 sebesar 108%, dan tahun 2020 sebesar 92%. Efektivitas kinerja keuangan Provinsi Jambi untuk tahun 2017, 2018, dan 2019 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% dan untuk tahun 2020 masih efektif namun nilainya berada dibawah 100%.

Dengan hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Berdasarkan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk menjalankan kinerja keuangannya secara efektif yaitu sudah sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

3. Rasio Efisiensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dari Dari tabel 4.4 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Provinsi Jambi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 rata-rata diatas angka 1 atau lebih dari 100% berada pada kategori tidak efisiensi, hal ini menggambarkan pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) belum Efisien. Artinya, biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar dibanding dengan output yang dihasilkan belum optimal.

Rata-rata efisiensi keuanfan daerah yang tidak efisien juga diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar dari pada pendapatan asli daerahnya. Meskipun pemerintah sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah PAD yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan belum efisien. Berdasarkan hasil yang belum bisa dikatakan efisien hal ini belum sejalan dengan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi dituntut untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasilnya, didalam teori ini juga dijelaskan bahwa tercapainya kesuksesan organisasi dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas dan manajemen, namun hasil analisis pada tingkat efisiensi berkebalikan dengan definisi teori stewardship, pada hasil analisa menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang lebih besar dibanding dengan yang dihasilkan belum bisa dikatakan optimal. Untuk itu kedepannya diharapkan pemerintah daerah Provinsi Jambi meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya sehingga untuk kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi terhadap pendapatan dan belanja daerah.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tidak begitu baik karena selama kurun waktu 4 tahun ini yang terlihat pada tabel 4.8 rasio pertumbuhan belum stabil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dikarenakan adanya penurunan hingga defisit dari tahun ke tahun, pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengefisienkan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan lebih mengefektifkan penggunaan pendapatan yang diperoleh daerah untuk sektor pembangunan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar 2.227,60 M, di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 2.859,65 M. mengalami penurunan sebesar 1.656,57 M pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 1.651,09 M di tahun 2019, dan untuk tahun 2020 kembali menurun sebesar 1.535,18 M.

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Provinsi Jambi pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 28,37% menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun mengalami penurunan sebesar -42,07% di tahun 2018 ini menunjukkan pertumbuhan yang negatif, dan untuk tahun seterusnya dari tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan yang negatif di tahun 2019 persentasenya sebesar -0,33% dan tahun 2020 persentase sebesar -7,02% hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD selama periode penelitian tidak mengalami pertumbuhan hal ini dikarenakan realisasi pemungutan PAD semakin menurun tiap tahunnya.

Pada tingkat pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi belum sesuai dengan penerapan teori stewardship untuk mempertanggungjawabkan aktivitas manajerial atas pengelolaan sumber daya dan keuangan dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan tujuan ekonomi, namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil pertumbuhan kinerja keuangan provinsi jambi yang mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pertumbuhan yang negatif atau bisa dikatakan menurun setiap tahunnya.

Dengan melihat ini pemerintah daerah harusnya mampu mengembang potensial dan terus meningkatkan pemungutan indikator indikator Pendapatan Asli daerah agar untuk tahun-tahun seterusnya tingkat PAD mengalami pertumbuhan yang positif.

5. Rasio Perbandingan Aktivitas

Berdasarkan pada data yang di lampirkan dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Provinsi Jambi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami naik turun. Pada tahun 2017 belanja daerah sebesar 16.872,74 M, kemudian mengalami penurunan sebesar 4.198,26 M di tahun 2018, kemudian naik menjadi 4.824,37 pada tahun 2019, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4.430,39 M. dan untuk belanja modal dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan, di tahun 2017 sebesar 3.913,99 M, mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 784,72 M, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 866,50 M dan di tahun 2020 menurun kembali sebesar 642,70 M.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa rasio aktivitas Provinsi Jambi pada komponen belanja operasi berada pada tingkat rata-rata 52,04% sementara pada komponen belanja pembangunan berada pada tingkat rata-rata 18,59%. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi lebih memprioritaskan alokasi sebagian besar dana yang dimiliki untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga tingginya belanja rutin mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja pembangunan dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD semakin relatif kecil.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Hal ini karena pemerintah lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

patokan yang pasti untuk belanja modal sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal belum terlalu terpenuhi.

Berdasarkan penerapan teori Stewardship dimana pemerintah dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengatur kinerja keuangan daerah Provinsi Jambi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi publik dan memberikan kesejahteraan masyarakat namun pada hasil penelitian ini dimana menjelaskan bahwa belanja modal masih terbilang kecil. Belanja modal tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta layanan publik. Sehingga dalam penelitian ini tingkat aktivitas belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan teori stewardship karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan pelayanan publik sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah belum terpenuhi.

Untuk kedepannya pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pelayanan masyarakat karena dimana dana belanja pembangunan tersebut diperuntukan bagi penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan sektor pembangunan yang mempunyai *Multiplier effect* yang artinya proses yang menunjukkan sejauh mana pendapat nasional efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. *Multiplier* bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosokan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama keatas tingkat pendapatan nasional, dan pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

6. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah

Indek kinerja keuangan pemerintah ini merupakan hasil rata-rata dari hasil rasio kebijakan fiskal, rasio kapasitas penciptaan pendapatan daerah, rasio belanja modal dan kontribusi sektor pemerintahan.

Pada hasil perhitungan di tabel 4.13 nilai kinerja fiskal dimana tahun 2017 dengan nilai asumsi 73, di tahun 2018 nilai asumsi 98, dan untuk tahun 2019 dan 2020 nilai asumsi 99 dari nilai asumsi terbaik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kebijakan fiskal yaitu 100, maka bisa dikatakan kebijakan fiskal cukup baik.

Untuk nilai asumsi Kapasitas Penciptaan pendapatan di tahun 2017 senilai 15, tahun 2018 senilai 8, tahun 2019 senilai 7,6 dan untuk tahun 2020 senilai 7,4 dengan nilai asumsi terbaik di 10, dari hasil tersebut dilihat bahwa tahun 2017 kapasitas penciptaan daerah sangat baik dan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 berada di bawah angka 10 berarti berada dikategori cukup baik.

Untuk perhitungan rasio proporsi belanja modal, pada tahun 2017 dihasilkan nilai 23,19, tahun 2018 di hasilkan nilai 18,68 ditahun 2019 dihasilkan nilai 17,96 dan 2020 dihasil nilai 14,50. Dilihat dari empat tahun tersebut nilainya berada jauh dibawah nilai asumsi terbaik yaitu 60 ini menggambarkan bahwa proporsi belanja modal kurang baik.

Pada perhitungan rasio kontribusi pemerintah dihasilkan nilai pada tahun 2017 sebesar 23,72 untuk 2018 senilai 21,72 tahun 2019 senilai 24,16 dan tahun 2020 senilai 25,36. Hasil tersebut melebihi nilai asumsi terbai rasio KSP yaitu 20 sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi pemerintah sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan model yang digunakan maka diperoleh hasil bahwa indeks kinerja keuangan pemerintah provinsi jambi secara umum selama periode tahun 2017 sampai dengan 2020 berada dikategori CUKUP BAIK, namun kondisi ini belum menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi jambi belum mengalami perbaikan menuju kearah yang lebih baik.

Jika dilihat dari hasil yang sudah cukup baik ini, disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah mulai menjalankan prinsip otonomi daerah dengan sesuai penerapan teori stewardship dimana pemerintah daerah Provinsi Jambi sudah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan pemerintahan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat meskipun pada dasarnya belum terlaksana sepenuhnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dari keempat indikator perhitungan indeks kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi hanya indikator proporsi belanja modal yang jauh dari kategori baik. Diharapkan kedepannya agar proporsi belanja modal lebih dioptimalkan serta lebih diprioritaskan. Untuk indikator kebijakan fiskal lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih mengoptimalkan pengumpulan pendapatan dari pajak dan lebih mengatur pengeluaran pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Selama kurun waktu empat tahun dalam periode penelitian tahun 2017-2020 dapat dikatakan berada pada kategori cukup mandiri.
2. Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam kurun waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020 berada pada kategori Tidak Efisien.
3. Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam kurun waktu empat tahun selama periode penelitian tahun 2017-2020 sudah berada pada kategori Efektif.
4. Tingkat pertumbuhan Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi dalam belum bisa dikatakan baik karena dalam kurun waktu empat tahun selama periode tahun 2017-2020 selalu terjadi penurunan.
5. Tingkat aktivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi belum berada pada kategori yang sangat baik karena selama kurun waktu empat periode tahun 2017-2020 pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan.
6. Indeks kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi secara umum selama periode tahun 2017-2020 brada pada kategori Cukup Baik.

B. Implikasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik tingkat kemandirian, tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat aktivitas Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jambi belum bisa dikatakan berada pada kategori yang sangat baik.

Implikasi yang dapat diberikan penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semakin baik tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi maka citra provinsi akan baik dan akan mempengaruhi bagaimana perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi baik dalam pembangunan dan pengelolaan Provinsi Jambi.
2. Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana dalam penambahan wawasan serta dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah harus lebih cermat dan hati-hati dalam penulisan tahunan, laporan APBD yang ingin di publikasikan lebih diperlengkap lagi serta lebih terperinci, dan juga diharapkan pemerintah agar lebih memprioritaskan pembanguan dalam alokasi dana APBD.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan APBD Provinsi Jambi., selain itu juga dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah agar peneliti selanjutnya menambahkan rasio keuangan daerah yang lain salah satunya dengan menggunakan rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*), dan menganalisis laporan Arus Kas dalam Pelaporan Anggaran Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Quran dan terjemahan*, t.t.
- Arinta, Kustadi. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Atmawati, Lilis. “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),” 2013, 111.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Boedi, Soelistijono. “Analisis Kinerja Keuangan Pada Apbd Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” 2 (2012): 8.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. 4 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Hamzah, Andy P, dan Nur Aisyah Kustiani. *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. 1 ed. Tangerang Selatan: STAN Press, 2014.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mailangkay, P P U, S Murni, dan P V Rate. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung,” 2020, 8.
- Mamesah. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Pilat, Juddy Julian, dan Jenny Morasa. “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015.” *ACCOUNTABILITY* 6, no. 1 (20 Juni 2017): 45.
<https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>.
- Pratama, Aidil Hada. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Skripsi,” 2017, 25.
- Rawis, S D, H Manosoh, dan R J Pusung. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2016-2018),” 2020, 10.
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu, 2001.
- Rukmana, Wan Vidi. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” t.t., 15.
- Soleh, Ahmad. “Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi,” t.t., 10.
- Solihin, Dadang. *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Artifa Duta Prakarsa, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambhi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambhi

- Suhardi, Didik. *Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP*. Jakarta: KEMDIKBUD, 2017.
- Susanto, Hery. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram.” *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (25 Maret 2019): 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.
- Ulum, Ihyaul. *Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar*. 1 ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Yuesti, Anik, NiLuh Putu Sandrya Dewi, dan Igusti Ayu Asri Pramesti. *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV Noah Aletheia, 2020.

B. SKRIPSI

- Atmawati, Lilis. “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang (2013).
- Pratama, Aidil Hada. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan” Skripsi, (2017).

C. JURNAL

- Boedi, Soelistijono. “Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” *Journal SPREAD 2, No.2* (2012).
- Donaldson, L., & Davis, J.H. Stewardship “*Theory Or Agency Theory : CEO Governance And Shareholder Returns*”, *Australian Journal of Management* (1991).
- Mailangkay, P P U, S Murni, dan P V Rate. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung,” *Jurnal EMBA Vol.8, No.3* (2020).
- Rawis, S D, H Manosoh, dan R J Pusung. “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (tahun 2016-2018),” *Jurnal EMBA Vol.8, No.3* (2020).
- Rukmana, Wan Vidi. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” (2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Soleh, Ahmad. “Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi,” *Jurnal Development*. (2012).

Susanto, Hery. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram.” *Distribusi - Journal of Management and Business* 7, no. 1 (25 Maret 2019).

Pilat, Juddy Julian, dan Jenny Morasa. “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015.” *Journal Accountability* Vol.6, no. 1 (20 Juni 2017)

D. WEBSITE

BPS.co.id

Djpk.kemenkeu.go.id

Jambiprov.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



RIWAYAT HIDUP



A. Identifikasi Diri

Nama : Jumiati
 NIM : 503180020
 Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Pering, 19 Januari 2000
 Alamat : Perum Villa Ratu Mas, Blok B,
 No.15, RT.52, Kelurahan Ekajaya,
 Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi
 No. HP : 0895-6052-9470-6
 E-mail : *jumiatywizela@gamil.com*
 Nama Ayah : Ambo Aming
 Nama Ibu : Hasnawati

B. Pendidikan Formal

1. 2006 - 2012 : SD Negeri 109/X Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur
2. 2012 - 2015 : SMP Negeri Satap 9 Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur
3. 2015- 2018 : SMA Negeri 2 Kota Jambi

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi Internal Kampus : GESKA (Gerakan Seni Kampus)
 Organisasi Eksternal Kampus : IPMAS (Ikatan Mahasiswa Sadu)
 IKAMI SULSEL JAMBI
 KAPEMA TANJABTIM

D. Moto Hidup :

"I have come to love myself for who I am, for who I was and for who I hope to become."

LAMPIRAN

Data APBD Murni Dan Realisasi APBD Provinsi Jambi

(dalam bentuk miliar)

Akun	2017		2018		2019		2020	
	pagu	realisasi	pagu	realiasi	pagu	realisasi	pagu	realisasi
Pendapatan Daerah	16.588,81	17.269,10	4.412,46	4.412,46	4.517,55	4.575,19	4.694,00	4.400,62
PAD	2.473,81	2.859,65	1.494,53	1.656,57	1.524,64	1.651,09	1.665,33	1.535,18
Pajak Daerah	1.565,86	1.748,08	1.272,73	1.656,57	1.296,51	1.345,11	1.407,86	1.292,73
Retribusi Daerah	199,66	116,48	21,20	20,21	23,65	19,11	25,88	18,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	108,10	104,77	43,06	30,51	33,19	31,06	33,21	27,92
Lain-Lain PAD Yang Sah	600,19	890,73	157,54	231,56	171,29	255,81	198,37	195,94
TKDD	13.344,34	13.622,05	2.721,89	2.754,35	2.991,42	2.922,49	3.027,06	2.862,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13.344,34	13.622,05	2.721,89	2.754,35	2.991,42	2.922,49	3.027,06	2.862,89
Pendapatan Lainnya	770,65	787,40	1,61	1,55	1,49	1,61	1,61	2,55
Pendapatan Transfer Antar Daerah	499,52	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	8,11	106,17	1,61	1,55	1,49	1,61	1,61	2,55
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Undang-Undang	263,03	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	17.164,52	16.872,74	4.515,14	4.198,26	4.813,41	4.824,37	5.244,84	4.430,39
Belanja Pegawai	6.830,59	6.058,95	1.393,62	1.303,79	1.573,75	1.382,61	1.743,92	1.391,32
Belanja Barang Jasa	3.164,00	3.469,03	892,93	941,77	994,01	1.024,03	995,82	743,29
Belanja Modal	3.739,27	3.913,99	993,99	784,72	939,17	866,50	1.056,50	642,70
Belanja Lainnya	3.430,67	3.430,77	1.234,60	1.167,97	1.306,48	1.551,22	1.448,61	1.653,09
Belanja Subsidi	14,85	14,57	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
Belanja Hibah	791,86	798,84	505,23	487,36	504,26	672,27	689,99	766,63
Belanja Bantuan Sosial	32,06	27,27	1,00	0,12	0,56	0,28	0,00	0,33
Belanja Tidak Terduga	54,13	13,79	4,00	0,10	19,50	0,09	18,43	152,70

Belanja Bagi Hasil	565,60	1.093,17	593,30	579,77	615,53	710,64	641,64	631,11
Belanja Bantuan Keuangan	1.972,17	1.483,14	130,57	100,13	166,13	167,43	98,06	101,77
Surplus/(Defisit)	-575,72	396,36	-297,12	214,21	-295,85	-249,17	-550,84	-29,77
Pembiayaan Daerah	575,72	1.354,09	0,00	0,00	295,85	669,50	550,84	420,32
Penerimaan Pembiayaan Daerah	661,03	1.428,66	297,12	457,07	310,85	669,50	550,84	420,32
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	661,03	872,19	297,12	457,07	310,85	669,50	550,84	420,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	85,31	74,57	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	49,59	65,78	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Jatuh Tempo	35,72	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.